

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul.

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan barang daerah bahwa Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan bagian daripada Pemerintahan di Daerah yang menjalankan sebahagian tugas-tugas Pemerintah Pusat didalam pengelolaan barang daerah dimana Biro Perlengkapan adalah Instansi Pemerintah yang diberi wewenang tugas untuk mengelola dan bertanggung jawab atas seluruh asset yang menjadi inventaris milik daerah yang berada di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, asset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi semakin besar dan jumlahnya semakin banyak karena asset Pemerintah Pusat yang berada di Pemenntah Provinsi dialihkan pengurusan dan pertanggung jawabannya ke daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi ini menambah beban dan tanggung jawab bagi aparat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk

mengurus dan bertanggung jawab atas keberadaan barang-barang inventaris yang ada di Pemerintah Provinsi masing-masing,

Sehubungan dengan pelaksanaan tertib administrasi maka setiap unit kerja pemakai/pengelola wajib menyampaikan informasi barang yang bertambah maupun berkurang, maupun laporan rekapitulasi barang dalam waktu yang telah ditentukan kepada Biro Perlengkapan sebagai pusat pengelolaan barang daerah. Dalam hal ini sering ditemukan masalah dalam memperoleh data-data barang yang benar dan akurat akibat dari sistem yang dilaksanakan belum sesuai dengan maksud yang ingin dicapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan inventarisasi barang dari masing-masing Unit/Satuan kerja adalah kurangnya tenaga terampil dalam mengoperasikan komputer untuk menyusun pelaporan inventaris barang, kurangnya penyediaan sarana untuk mendukung kelancaran pengelolaan barang daerah sehingga sering terdapat kesalahan data/informasi yang kurang akurat serta faktor kendala jarak jauh antara Instansi terkait.

Menurut penelitian yang dilakukan penulis bahwa selama ini kegiatan operasional dalam Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih menggunakan sarana komputer yang terpisah-pisah yaitu belum terintegrasi secara networking (jaringan), sehingga tidak terdapat suatu jaminan tingkat pelayanan dengan kata lain komputer yang dipakai fungsinya hanya sebagai alat pengolahan kata, dikarenakan belum adanya manajemen sistem yang